

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Aermadepa, et.all. *Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia (Tantangan dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi)*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Ali, Mahrus. *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013.
- Anwar, Bagus. *Politik Hukum Sistem pemilu: peralatan Sistem Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Duta Raya Edukasi, 2020.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- _____. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Asy'ari, Hasyim. *Konsolidasi Demokrasi, Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Gladies, Margie, dkk. *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*. Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2023.
- Henriquez, Jesus Orozco, dkk. *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Stockholm, Swedia: The International IDEA, 2010.
- Hutabarat, Martin, et.all,. *Hukum dan Politik Indonesia: Tinjauan Analisis Dekrit Presiden dan otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- International IDEA. *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Stockholm: Bull Graphics, 2010.
- _____. *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002.

- _____. *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu Seri: Buku Panduan*. Halmstead: Bulls Tryckeri, 2002.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2018.
- Khoiriyah, Fatikhatul dan Ahmad Syarifudin, *Ketentuan Pidana Pemilihan Umum: Pola Penanganan, Norma, dan Unsur Pidana Pemilu*. Lampung: Permata Publishing, 2018.
- Kusnardi, Mohammad, dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988.
- Komisi Pemilihan Umum. *Menjawab Problematika Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Verifikasi Parpol PEMilu 2024*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2022.
- _____. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Jakarta: KPU RI, 2019.
- Mahfudin, Moh. Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- _____. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2014.
- Mahkamah Konstitusi. *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2024*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2024.
- Miinuddin. *Demokrasi Pilkada Dalam Sistem Politik Lokal*. Bengkulu: zigie Utama, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi, Ahmad. *Politik Hukum*. Padang: Akademika, 2013.
- Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat Cetakan Terakhir*. Bandung: Angkasa, 1980.
- _____. *Penegakkan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

- Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2022.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Semarang: Penerbit Yayasan Diponegoro, 2018.
- Surbakti, Ramlan, dkk. *Naskah Akademik Draft RUU Tentang Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil*. Jakarta: Kemitraan, 2015.
- _____, dkk. *Seri Demokrasi Elektoral Buku 15: Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan, 2011.
- Rosadi, Ootong, dan Andi Desmon. *Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2020.
- Safudin, Endrik. *Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum: Telaah Kritis atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung*. Malang: Q. Media, 2021.
- Saho, Sarbeswar. "Why Electoral Integrity Matter, by Pippa Norris". *Democratization* 22(6). DOI: <https://doi.org/10.1080/13510347.2015.1022149>
- Santoso, Topo dan Hariman Satria. *Hukum Pidana Pemilu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Santoso, Topo. dkk. *Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perludem, 2006.
- Setiono. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Syaukani, Imam, dan Ahmad Ahsin Tohari. *Dasar-Dasar Politik Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Thaib, Dahlan, dan Ni'matul Huda. *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1992.

Tricahyono, Ibnu. *Reformasi Pemilu*. Jakarta: In-Trans, 2009.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Wargakusumah, Mohammad Hasan, dan L. Sumartini. *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2000.

JURNAL

Andromeda, Muhammad dan Benny Sumardina. "Kesenjangan Hukum dalam Pengaturan Sidang In Absentia antara UU Pemilu dan UU Pilkada: Implikasi terhadap Kepastian Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan". *Bookchapter Hukum dan Lingkungan Jilid 2*, 2025.

Asshiddiqie, Jimly. "Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi", *Jurnal Konstitusi* 3(4), 2006.

Atmadja, I Dewa Gede. "Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum", *Kertha Wicaksono* 12 (2). 146. DOI: 10.22225/kw.12.2.2018.145-155.

Budoyo, Spto. "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Ilmiah CIVIS* 4(2), 2014.

Candra, Fadhlin Ade dan Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(1), 2021.

Erawan, Moh Arief dan Marten Bunga. "Harmonisasi Regulasi Pemilu dalam Konteks Pemilu Serentak 2024". *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2(1), 2025.

Gabriela, Imanuella, dkk. "Analisis Yuridis Proses Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu". *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 5(4), 2025.

Islamiyati, dan Dewi Hendrawati. "Analisis Politik Hukum dan Implementasinya". *Law, Development & Justice Review* Vol 2. 2019.

- Kafrawi, Rachman Maulana, et.all. "Harmonization Between Investigators and Advocates in the Law Enforcement Process". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11 (1), 2023. DOI : 10.29303/ius.v11i1.117
- Kurnia, Kamal Fahmi. "Menakar Penegakan Hukum Praktik Politik Uang (Money Politic) dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu (*Electoral Justice*)". *Jurnal LITIGASI* 25(2), 2024. DOI:<https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.17313>
- Mangoli, Arly Y. "Eksistensi Peradilan In Absentia dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia menurut KUHAP". *Lex Crimen* 4(3), 2016.
- Maulana, Romi. "Desain Khusus Hukum Pidana Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 2(3), 2021.
- Nuribadah, "Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia", *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 1, (2023), hal. 350. DOI: <https://doi.org/10.55292/sb6hw267>
- Saho, Sarbeswar. "Why Electoral Integrity Matters, by Pippa Norris", *Democratization* 22(6), 2015.
- Susskin, Richard. "Legal Information: a Personal Appraisal of Context and Progress", *European Journal of Law and Technology* 1(1), 2010.
- Tanzil, Devina. "Peninjauan Electoral Justice sebagai Upaya dalam Mewujudkan Pemilu 2024 yang Berkeadilan", *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Edisi* 3(2), 2021.
- Telaumbanua, Dalinama. "Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Melalui Lembaga Penegakan Hukum Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Pemilu di Indonesia". *Jurnal Education and Development* 13(2), 2025. DOI: 10.37081/ed.v13i2.7410
- Prianto, Wahyu. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan melalui Mekanisme Prakfaktum Berbasis Nilai Keadilan", *Universitas Islam Sultan Agung*, 2024.
- Putri, Nur Kemala, dkk. "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, antara Bentuk, Penyebab, dan Solusi", *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1(1), 2024. DOI: <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.17>
- Tresnadipangga, Bimo, dkk. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum* 12(1), 2023. DOI: 10.37893/jbh.v12i1.438.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah tiga kali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024-2045.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2024

PUTUSAN PERADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025.

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Gdt.

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu.

Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk.

Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

Putusan Nomor 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg.

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Rbi.

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Gst.

Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Jth.

Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Smn.

Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2035 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029.

SKIRPSI

Amelia, Cici. *Pelaksanaan terhadap Putusan In Absentia Pada Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bojongkinang Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (2022).

Maharani, Silvy Dinar. *Urgensi Pembentukan Kodifikasi Undang-Undang Pemilihan Umum di Indonesia*. Skripsi. Universitas Jember. (2023).

Wijaya, Ebby Ramdhani Syahri. *Integrasi Norma Hukum Pemilu dan Pilkada melalui Kodifikasi Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. (2022).

INTERNET

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2023. *Puadi Jelaskan Beda Kewenangan 'In Absentia' UU Pemilu dan Pemilihan dalam Penanganan Pelanggaran*.
<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/puadi-jelaskan-beda-kewenangan-absentia-uu-pemilu-dan-pemilihan-dalam-penanganan-0>.

Bawaslu. 2020. *Bawaslu Harap ada Aturan Jelas Terkait "In Absentia" di Masa Pandemi*.
<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-harap-ada-aturan-jelas-terkait-absentia-di-masa-pandemi>.

Empower Laws. 2024. *Understanding Legal Certainty: A Crucial Principle in Law*. <https://empowerlaws.com/legal-certainty/>.

Tempo. 2023. *Adu Dalil Mahfud MD dan Arsul Sani di RDP Komisi III DPR, Begini Bunyinya*.
<https://www.tempo.co/politik/adu-dalil-mahfud-md-dan-arsul-sani-di-rdp-komisi-iii-dpr-begini-bunyinya-201694?utm>.

Tempo. 2024. *Kata Titi Anggraini Soal Penyatuan UU Pemilu dan UU Pilkada dalam Satu Naskah*.
<https://www.tempo.co/politik/kata-titi-anggraini-soal-penyatuan-uu-pemilu-dan-uu-pilkada-dalam-satu-naskah-1172325>.

Hukum Online, 2022, *Memaknai Harmonisasi Peraturan di Indonesia*.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/memaknai-harmonisasi-peraturan-di-indonesia-lt629d92ccd8920/>.

Rio Ferdinand Turnip. *Apa itu Peradilan In Absentia dalam Perkara Pidana dan Perdata? Hukum Online*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-peradilan-in-absentia-lt4f2e502cd0e52/>.

Ace Project, *The Electoral Knowledge Network, "Electoral Integrity"*,
<https://aceproject.org/ace-en/topics/ei/eib/default>.

- Ady Thea. 2025. "Pilkada Masuk Rezim Pemilu, MK Dituding Melampaui Kewenangannya", *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pilkada-masuk-rezim-pemilu--mk-dituding-melampaui-kewenangannya-lt686b2c852a285/?page=1>.
- Devi Harahap. 2025. *Respons Putusan MK Soal tak Ada Perbedaan Rezim Pemilu dan Pilkada, Pakar: Pilkada harus Dipilih Langsung*. <https://mediaindonesia.com/pilkada/796644/respons-putusan-mk-soal-tak-ada-perbedaan-rezim-pemilu-dan-pilkada-pakar-pilkada-harus-dipilih-langsung>, diakses pada 5 Desember 2025.
- Rini Kurtiasih. 2020. *Rezim Pemilu dan Rezim Pilkada Disatukan*. *Kompas.id*, https://www.kompas.id/artikel/ruu-pemilu-dorong-penyatuan-dua-rezim?open_from=Search_Result_Page, diakses pada 2 Desember 2025.